

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar

Pada bab ini, penulis akan mendalami secara sungguh penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini. Sebelum masuk dalam diskursus yang lebih intensif mengenai kedaulatan bahasa Indonesia di era digital, penulis merasa perlu untuk membuat tinjauan pustaka sebagai salah satu bagian penting dalam penulisan skripsi ini. Dalam pengertian yang lebih integral, tinjauan pustaka dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian, menyesuaikan sistem yang sudah pernah dibuat dengan karakteristik objek yang menjadi permasalahan pada penelitian ini, serta mencermati metodologi penelitian apa yang dirasa tepat dalam mengevaluasi efektivitas penyelesaian masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada skripsi ini.

2.2 Membedah Penelitian-penelitian Sebelumnya

Setelah melakukan pembacaan yang sungguh terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis, secara spesifik membedah lima penelitian yang telah dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah. Tentunya, kelima penelitian tersebut, pada hemat penulis merupakan penelitian yang mempunyai korelasi dengan tema yang penulis garap. Kelima hasil penelitian tersebut antara lain, *pertama*, *Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Gobalisasi*. Penelitian ini dibuat oleh M. Mugni Assapari pada 2014 silam. Penelitian ini dimuat pada *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni dan Pengayaannya*, sebuah jurnal milik Universitas Pendidikan Ganesha yang terletak di Bali. Dalam penelitian tersebut, Assapari secara garis besar mempersoalkan eksistensi bahasa Indonesia di tengah globalisasi. Menurutnya, bahasa Indonesia pada tingkatan waktu tertentu akan mengalami kepunahan. Hal tersebut disebabkan oleh anak muda, para pebisnis, dan pejabat yang masif menggunakan “bahasa gaul” dan bahasa asing dalam praktik kehidupan sehari-hari. Menyikapi hal tersebut, Assapari menawarkan cara baru agar

bahasa Indonesia tetap eksis, yakni dengan menginternasionalkan bahasa dan memartabatkan bangsa Indonesia.

Kedua, Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Generasi Muda pada Masa Covid-19 dan Era Globalisasi. Penelitian ini dibuat oleh Eunike Manurung, Miftah Rizkiyah, dan Fitriani Lubis. Penelitian ini dipublikasikan pada September 2021 pada *Dialektika*, sebuah jurnal ilmiah milik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut, Eunike Manurung, Miftah Rizkiyah, dan Fitriani Lubis menemukan bahwa pandemi Covid-19 ternyata mempunyai dampaknya tersendiri terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut relevan dengan situasi yang terjadi di lapangan, di mana ada begitu banyak istilah asing yang turut merebak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Lebih lanjut, Eunike Manurung, Miftah Rizkiyah, dan Fitriani Lubis menekankan beberapa hal penting yang seyogianya perlu dilaksanakan agar eksistensi bahasa Indonesia tetap dipertahankan. Hal tersebut antara lain, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan berkualitas, peran pemerintah dan kemauan untuk mempelajari bahasa Indonesia.

Ketiga, Kajian Budaya: Kebijakan Bahasa di Tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini dibuat oleh Fitry Alfarisy pada September 2020 dan dipublikasikan pada *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, sebuah jurnal ilmiah milik Universitas Diponegoro. Dalam penelitian tersebut, Alfarisy secara intens menyoroti situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia baru-baru ini serta implikasinya terhadap pelbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Secara spesifik, Alfarisy menemukan suatu persoalan pada eksistensi bahasa Indonesia yang mendapatkan pengaruh dalam penggunaannya di ruang publik. Bertolak dari realitas tersebut, Alfarisy melalui penelitiannya tersebut menegaskan agar otoritas terkait, dalam hal ini pemerintah, agar sebisa mungkin mencari padanan kata yang tepat guna menggantikan kosakata dan istilah asing yang terlanjur meluber dalam ruang publik.

Keempat, Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. Penelitian ini dibuat oleh Zahri Nasution dan dipublikasikan pada *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (yang penulis bedah pada bagian ini), penelitian ini merupakan penelitian yang lebih dahulu dibuat dan dipublikasikan. Penelitian ini dipublikasikan pada Desember 2007. Pada hemat penulis, penelitian ini sedikit memberi warna berbeda dalam pembahasannya. Hal tersebut disebabkan karena Zahri Nasution menampilkan fenomena kebahasaan dari sudut pandang politik – sebuah sudut pandang yang acapkali tidak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penjelasannya, Zahri Nasution mengungkapkan bahwa dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, para pemangku kekuasaan kerap menggunakan beberapa distorsi bahasa dalam komunikasi politik. Hal tersebut antara lain, bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi, dan bahasa sebagai ideologi. Lebih lanjut, Zahri Nasution menawarkan agar disediakan ruang publik untuk memunculkan wacana. Tak sebatas itu, ruang publik yang diharapkan oleh Zahri Nasution adalah ruang publik yang diimbangi dengan massa. Hal ini menurutnya akan jauh lebih efektif dalam memunculkan wacana tandingan.

Kelima, Pengajaran Bahasa Asing Peng-“indo”-an atau Pencerahan Bangsa? Penelitian ini dibuat oleh Manneke Budiman, seorang Guru Besar Ilmu Susastra dan Kajian Budaya (Cultural Studies) pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut, Budiman terlebih dahulu menampilkan kesangsiannya terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang terlanjur terkikis oleh masifnya penggunaan bahasa asing, secara khusus bahasa Inggris. Budiman mengakui bahwa boleh jadi upaya untuk memperkokoh bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa asing dalam pergaulan masyarakat Indonesia adalah suatu tindakan kesiangan. Budiman menambahkan bahwa kemapanan bahasa Inggris dalam pentas pergaulan dunia memang tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang kolonialisme. Hal tersebut juga didukung oleh munculnya banyak

pembelajaran bahasa asing di sekolah pun lembaga tertentu, yang tanpa disadari turut mengembangkan dominasi bahasa asing. Menyadari realitas tersebut, Budiman menganjurkan agar para guru bahasa asing mampu merekayasa arah pendidikan kaum muda dan pembelajar bahasa asing agar tidak tenggelam dalam jenis identitas yang bukan menjadi identitasnya. Dengan demikian, pengajaran bahasa asing tidak sekadar berurusan dengan bagaimana membuat para pembelajar mahir dalam bahasa asing, tetapi juga dengan bagaimana mereka dapat menjadi kritikus budaya yang berwawasan plural.

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang lebih integral mengenai penelitian-penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menampilkan secara ringkas isi dari penelitian-penelitian tersebut. Berikut, isi ringkas dari kelima penelitian tersebut:

2.2.1 Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Globalisasi⁷

Era globalisasi merupakan tantangan besar bagi seluruh warga dunia termasuk bangsa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung, setiap negara dituntut untuk memiliki peran dalam perkembangan dunia, di mana hal ini membawa pengaruh besar dalam perkembangan negara tersebut. Di tengah situasi seperti ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan pelbagai persoalan yang dapat mengguncang eksistensinya. Implikasi logis dari era globalisasi sendiri nyata dalam praktik berbahasa masyarakat Indonesia yang lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia populer dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa agar harus bekerja keras untuk

⁷ M. Mugni Assapari, "Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Globalisasi", *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni dan Pengayaannya*, 9:18 (Universitas Pendidikan Ganesha: Juli-Desember 2014), hlm. 29-37.

menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia semakin lama semakin pudar karena banyak orang Indonesia, terutama anak muda, para pebisnis, dan pejabat yang menggunakan bahasa selain Indonesia, seperti “bahasa gaul” dan bahasa asing. Bahasa asing tersebut antara lain bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan beberapa bahasa lainnya. Tentunya, hal tersebut merupakan kenyataan yang cukup ironis karena orang Indonesia sendiri justru lebih bangga apabila menguasai bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri.

Masyarakat Indonesia, sebagai pemakai bahasa Indonesia, sudah seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan bahasa Indonesia, mereka dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain. Bangsa Indonesia semestinya bangga memiliki bahasa yang dapat mewakili perasaan dan pikirannya itu. Namun, kenyataannya tidak demikian. Rasa bangga dalam berbahasa Indonesia belum seutuhnya tertanam pada diri masyarakat Indonesia. Rasa menghargai bahasa asing (dahulu bahasa Belanda, sekarang bahasa Inggris) masih terus tampak pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih tinggi derajatnya dibanding bahasa nasional mereka sendiri, bahasa Indonesia. Bahkan, mereka seolah acuh tak acuh dengan perkembangan bahasa Indonesia.

Fenomena negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut: *Pertama*, banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka sendiri tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. *Kedua*, banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing (Inggris) tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. *Ketiga*, banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya lebih menguasai bahasa Indonesia dengan baik. *Keempat*,

banyak orang Indonesia merasa dirinya telah pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing (Inggris) dengan fasih walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna.

Kenyataan-kenyataan tersebut merupakan sikap pemakai bahasa Indonesia yang negatif dan tidak baik. Hal itu akan berdampak negatif pula pada perkembangan bahasa Indonesia. Sebagian pemakai bahasa Indonesia menjadi pesimis, menganggap remeh, dan tidak percaya kemampuan bahasa Indonesia dalam mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan lengkap, jelas, dan sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan tentang eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pergaulan pada era globalisasi.

Dalam upaya menjawab persoalan di atas, hal penting yang harus dilakukan ialah menginternasionalkan bahasa dan memartabatkan bangsa Indonesia. Hal yang paling mendasar untuk menangkap peluang tersebut adalah membangun komitmen internal, yakni komitmen pemerintah pusat dengan perangkat-perangkat terkait serta lembaga-lembaga yang dimilikinya. Komitmen tersebut harus diikuti dengan visi, misi, dan tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia dengan jelas. Kementerian Luar Negeri dengan seluruh perangkatnya, menjadi perpanjangan tangan pemerintah RI untuk melakukan kerja sama dengan Departemen Pendidikan Luar Negeri, terutama dengan PTN/PTS di negara-negara lain. Strategi-strategi teknis tersebut menjadi modal utama sekaligus menjadikan pembelajaran BIPA⁸ lebih profesional. Bila komitmen itu terbangun, maka harapan bersama untuk bisa mengantar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional semakin terbuka lebar.

⁸ BIPA merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA sendiri adalah sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Kehadiran BIPA sendiri merupakan sebuah usaha untuk mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang digalang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud).

2.2.2 Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Generasi Muda pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era Globalisasi⁹

Bahasa Indonesia merupakan bahasa istimewa yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya, eksistensi atau keberadaan bahasa Indonesia ini terguncang oleh pengaruh globalisasi dan pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi muda selama Pandemi Covid-19, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi eksistensi penggunaan bahasa Indonesia serta untuk menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi di tengah era globalisasi ini memang memengaruhi keberadaan penggunaan bahasa Indonesia. Faktor internal yang memengaruhinya adalah adanya pandangan bahwa dengan menggunakan bahasa asing, maka gaya hidup seseorang dianggap paling modern. Sedangkan, dari faktor eksternal, hal tersebut diakibatkan oleh pengaruh lingkungan, tempat generasi muda itu berada. Sebagai contoh, dalam rangka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak pada salah satu perusahaan asing dan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di luar negeri, seseorang bisa saja mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dalam menjawab persoalan di atas, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar keseimbangan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda tetaplah terjaga. *Pertama*, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan berkualitas. Hal ini berarti, dalam mengupayakan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan berkualitas, para pengajar harus mampu meningkatkan kesadaran para peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama antarsesama. Selain itu, para pengajar pun perlu menanamkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi belaka, tetapi lebih daripada

⁹ Eunike Manurung, Miftah Rizkiyah, dan Fitriani Lubis, “Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalangan Generasi Muda pada Masa Pandemi Covid-19 dan Era Globalisasi”, *Dialektika*, 8:1 (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: September 2021), hlm. 55-68.

itu, bahasa Indonesia juga merupakan identitas bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang benar-benar bermartabat.

Kedua, peran pemerintah. Pemerintah kiranya dapat menghasilkan sejumlah kebijakan dalam bentuk peraturan dan program demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus dapat memperbaiki sistem pembelajaran bahasa Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi misalnya, visi dan misi pendidikan bahasa Indonesia bukan hanya bertujuan untuk meluluskan mahasiswa dengan predikat nilai yang memuaskan, melainkan membuat peserta didik mampu berkomunikasi secara baik dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Ketiga, kemauan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu hal yang tak kalah pentingnya dalam menjaga keseimbangan eksistensi penggunaan bahasa Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di era globalisasi ini adalah diperlukan peningkatan kemauan diri sendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Sebab, meskipun pemerintah telah berusaha untuk membuat pelbagai kebijakan ataupun peraturan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar selalu menekuni bahasa Indonesia, tetapi jika masyarakatnya tidak bersedia mengikuti ataupun mematuhi peraturan tersebut, maka hal tersebut tidak akan memberi sumbangan yang positif untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

2.2.3 Kajian Budaya: Kebijakan Bahasa di Tengah Pandemi Covid-19¹⁰

Utamakan Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa Asing, Lestarikan Bahasa Daerah merupakan amanat dari UU No.24/2009 yang mengindikasikan bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa persatuan di ruang publik. Di sisi lain, pandemi virus korona atau Covid-19 telah membawa banyak dampak terhadap kehidupan berbangsa, termasuk berbahasa. Virus yang

¹⁰ Fitri Alfarisy, “Kajian Budaya: Kebijakan Bahasa di Tengah Pandemi Covid-19”, *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi* 4:3 (Universitas Diponegoro: September 2020), hlm. 343-353.

berasal dari negara asing dan menjangkiti hampir seluruh bagian bumi ini membawa pelbagai istilah asing masuk ke bangsa ini. Pada saat inilah kebijakan pemerintah Indonesia tentang bahasa Indonesia diuji karena pejabat pemerintah sering kali menggunakan istilah asing dalam menjelaskan situasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif guna menjabarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menghadapi pelbagai istilah asing yang masuk ke Indonesia. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh hasil penelitian terkait kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di saat pandemi dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut dipandang dari sudut pandang dunia digital. Data penelitian berasal dari pelbagai situs pemerintah terkait, istilah kebahasaan, serta berasal dari mesin pencarian *Googletrend* guna melihat tren penggunaan istilah kebahasaan terkait pandemi korona tersebut di dalam dunia digital Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa 45 padanan kata asing tentang korona serta sudah menyosialisasikannya secara masif di dunia internet. Padanan kata asing yang diberikan pemerintah ternyata beberapa digunakan dengan baik seperti *kerja dari kantor* dan *kerja dari rumah*. Namun, selain itu, lebih banyak masyarakat yang menggunakan istilah asing seperti *corona virus*, *social distancing*, *physical distancing*, dan *new normal*. Oleh karena itu, perlu peran setiap warga negara, pemerintah, dan media di masa pandemi untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar guna menjaga kedaulatan bahasa Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia baru-baru ini mulai memengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahasa Indonesia pun mendapatkan pengaruh dalam penggunaannya di ruang publik. Pelbagai istilah bahasa Inggris seperti *corona virus*, *droplet*, *disinfectan*, *lockdown*, *work from home* dan lain-lain mulai akrab di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Sedangkan, sebagian masyarakat lain di kalangan bawah dan pedalaman kurang memahami istilah tersebut sehingga pelbagai imbauan pemerintah terkait penanganan virus korona pun tidak berjalan dengan baik.

Dalam upaya menyikapi hal tersebut, Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan berupa daftar pelbagai padanan bahasa Indonesia terkait istilah bahasa Inggris yang ‘meluber’ selama pandemi Covid-19. Sekurang-kurangnya terdapat 45 istilah dalam bahasa Inggris yang telah diberikan padanan bahasa Indonesianya. Sebagai contoh, *work from home* dipadankan menjadi *kerja dari rumah*, *social distancing* dipadankan menjadi *penjarakan sosial*, *physical distancing* dipadankan menjadi *penjarakan fisik*, *new normal* dipadankan menjadi *kenormalan baru* dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pelbagai istilah asing dalam bahasa Inggris terkait virus korona sudah diberikan padanannya dalam bahasa Indonesia yang diharapkan dapat digunakan di ruang publik, baik oleh pejabat pemerintahan maupun media, baik itu media *online* maupun media cetak. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Kebudayaan telah menyosialisasikan penggunaan istilah tersebut melalui laman resmi Kemendikbud. Pelbagai istilah tersebut diserap langsung ke dalam bahasa Indonesia seperti ventilator, respirator dan zoonosis. Sedangkan sebagian yang lain diserap dengan perubahan bentuk kata seperti bahasa Indonesia di mana ucapan dan tulisannya sama seperti antiseptik, klorokuin, korona virus; virus korona, suspek korona, dan disinfektan. Dan sisanya diterjemahkan ke dalam kata bahasa Indonesia yang sudah cukup familiar bagi masyarakat, tetapi asing untuk suatu istilah. Terlepas dari bentuk padanan istilah asing terkait korona, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dalam kondisi pandemi seperti ini tetap menjalankan amanat UU No.24/2009 guna memperkuat kedaulatan bahasa Indonesia sekaligus mempermudah pemahaman masyarakat Indonesia di pelbagai wilayah serta lapisan.

2.2.4 Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan¹¹

Salah satu sistem isyarat yang paling penting bagi manusia adalah bahasa. Bahasa merupakan kekuasaan (language is power) dan sangat berperan dalam mencapai tujuan nasional maupun internasional suatu bangsa. Penggunaan bahasa secara suspensif, termasuk di dalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa dengan pelbagai aspeknya, begitu menonjol dalam dunia politik di Indonesia. Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah membayangkan adanya forum atau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar ataupun negara. Produk pertarungan dan rekayasa politik telah menimbulkan suatu struktur kekuasaan yang lebih menekankan peran edukatif yang lebih besar daripada lembaga legislatif atau yudikatif. Beberapa distorsi bahasa dalam komunikasi politik adalah bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi, dan bahasa sebagai ideologi. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Ketersediaan ruang publik akan efektif dalam memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan perubahan struktural dalam masyarakat, terutama menyangkut hubungan antara elite dengan massa.

Melalui bahasa juga, terlihat keinginan dominasi Barat modern atas masyarakat non-Barat pada abad lalu, atau bahkan hingga saat ini, yang terjadi di mana-mana, tidak hanya terjadi di kepulauan Nusantara, yang tidak lain merupakan suatu upaya mempertahankan kekuasaan Barat atas non-Barat. Hal ini terlihat secara nyata pada pelbagai kajian tentang kolonialisme, imperialisme, *underdevelopment*¹²

¹¹ Zahri Nasution, "Bahasa sebagai Alat Komunikasi dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan", *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 01:03 (Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Desember 2007), hlm. 445-464.

¹² Teori Keterbelakangan (Underdevelopment) mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang memaksakan diri untuk mencapai kemajuan dengan melakukan modernisasi, walupun sebenarnya mereka (negara-negara berkembang) tidak akan dapat sepenuhnya mengikuti pembangunan negara-negara Barat sehingga menimbulkan adanya ketergantungan dan keterbelakangan.

dan *dependensia*¹³ yang banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk memahami proses dominasi Barat dan atau Utara di bagian besar dunia ini. Pelbagai pemikiran tersebut terlalu mendasarkan analisisnya pada bidang politik-ekonomi, bukan bahasa. Bahkan, kajian-kajian tersebut biasanya membuat generasi yang sangat luas, yang dapat merupakan pengaruh bahasa sebagai alat komunikasi politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya di negara penerima program.

Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman dan mengemukakan bagaimana bahasa memiliki pelbagai fungsi dalam kaitannya dengan komunikasi, bahkan tidak jarang digunakan sebagai alat komunikasi politik penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Penggunaan bahasa secara suspensif, termasuk di dalamnya penyalahgunaan (abuse) bahasa dengan pelbagai aspeknya begitu menonjol dalam dunia politik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan ruang publik politis yang “inklusif”, “egaliter” dan “bebas dari tekanan”, dengan tambahan ciri lainnya, misalnya: pluralisme, multikulturalisme, toleransi dan seterusnya. Beberapa distorsi bahasa dalam komunikasi politik adalah bahasa sebagai topeng, sebagai proyek lupa, bahasa sebagai representasi dan bahasa sebagai ideologi. Digunakannya bahasa yang terdistorsi ini antara lain agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetap dapat bertahan. Ketersediaan ruang publik akan dapat efektif untuk memunculkan wacana tandingan apabila diimbangi dengan massa. Namun demikian, perluasan ruang publik akan menjadi sia-sia apabila masyarakat luas justru menjadi pihak yang tidak memiliki akses terhadap ruang publik tersebut. Dalam kondisi demikian, ruang publik yang terbentuk bukan merupakan ruang publik yang otonom, tetapi lebih kepada akibat adanya dominasi elite dan kapital, dan politisi yang pro terhadap rezim penguasa.

¹³ Menurut Theotonio Dos Santos, dependensi atau *dependensia* adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

2.2.5 Pengajaran Bahasa Asing Peng-“indo”-an atau Pencerahan Bangsa?¹⁴

Mempersoalkan dampak bahasa asing pada identitas kultural suatu kelompok manusia pada masa seperti sekarang ini bisa dilihat sebagai suatu tindakan kesiangan, sebagai pseudo-problem, dan bahkan sebagai ilusi neurotik untuk kembali ke keadaan masa lampau yang hanya ada dalam imajinasi. Hal ini menjadi lebih gamblang, khususnya bahasa asing yang dipersoalkan adalah bahasa Inggris, yang secara *de facto* telah menjadi *lingua franca*¹⁵ komunitas internasional. Masih adakah gunanya berteriak tentang dampak kultural bahasa Inggris pada pemahaman kita tentang diri sendiri maupun dunia tempat kita hidup di kala kita sendiri nyaris tak lagi dapat bertahan hidup tanpa penguasaan atas bahasa Inggris? Namun demikian, jawaban sekaligus akar permasalahan justru terletak pada pertanyaan itu sendiri. Bahwasanya, bahasa asing atau tepatnya bahasa Inggris, yang telah sedemikiannya mendominasi hidup kita sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dengan demikian cenderung diterima begitu saja sebagai suatu fakta yang tak dapat diganggu-gugat, seharusnya dilihat sebagai suatu persoalan serius. Kita tak lagi merasa perlu bertanya mengapa, karena kita telah menerima kebutuhan untuk mampu berbahasa Inggris sebagai suatu keniscayaan, seperti juga dengan kebutuhan kita untuk makan, bernapas, dan tidur. Dengan kata lain, bahasa Inggris telah menjadi bagian dari darah dan daging kita, meskipun itu tidak serta-merta berarti bahwa kita telah menguasai bahasa Inggris dengan sempurna.

Kenyataan ini cukup mengusik, terlebih kerana keistimewaan serupa tidak dinikmati oleh bahasa-bahasa asing lainnya, baik yang berasal dari Eropa maupun Asia. Argumen terkuat yang diajukan untuk menjelaskan situasi ini, sejauh yang penulis ketahui, adalah yang berbasis pada sejarah imperialisme Inggris. Jika kita kaji

¹⁴ Manneke Budiman, “Pengajaran Bahasa Asing Peng-“indo”-an atau Pencerahan Bangsa”, dalam *Academia.edu*, https://www.academia.edu/download/6924053/Pengajaran_Bahasa_Asing_UNY_2.pdf, diakses pada 11 November 2022.

¹⁵ Istilah *lingua franca* secara harfiah berarti “lidah bangsa Franka”, yang dengan demikian merujuk pada bahasa yang dipakai oleh suku Franka di Jerman. Secara utuh, *lingua franca* adalah sebuah bahasa yang biasa dipakai sebagai bahasa perantara atau bahasa penghubung di antara kelompok-kelompok yang tidak memiliki bahasa ibu yang sama.

lebih lanjut, masih ada alasan lain untuk kembali mempertanyakan kedigdayaan bahasa Inggris, khususnya pada saat ini, ketika dunia tidak lagi dapat melepaskan diri dari dominasi bahasa Inggris dan sudah sangat terlambat untuk bertanya mengapa. Dalam kecenderungan studi masa kini, kemapanan selalu menjadi sasaran kajian kritis karena dalam dan lewat kemapananlah, cara pandang dan sistem nilai dominan disebarluaskan serta dilestarikan. Kita perlu memahami secara kritis mengapa dan bagaimanakah kemapanan itu terbentuk, apakah dampaknya pada realitas hidup kita, dan masih adakah ruang untuk menyiasati kemapanan itu.

Bangsa-bangsa Eropa Barat, dengan Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai ujung tombaknya, telah lama belajar untuk memandang dirinya sebagai sekelompok bangsa yang telah selangkah lebih maju daripada bangsa-bangsa lain, baik dari segi budaya (peradaban Barat), ekonomi (kapitalisme liberal), maupun politik (demokrasi). Oleh karena itu, standar kemajuan di dunia diukur berdasarkan standar-standar kemajuan yang telah dicapai di Eropa Barat. Inilah yang melahirkan orientalisme sebagai sebuah paradigma berpikir dan belakangan sebagai sebuah disiplin pengetahuan. Pandangan ini pula yang menjadi pembenaran bagi misi pemberadaban dunia dengan bangsa-bangsa Eropa sebagai agen utamanya. Orientalisme dan misi luhur pemberadaban pada akhirnya bersama-sama menjadi tiang-tiang penopang proyek imperialisme Barat di belahan dunia yang disebut dengan “dunia ketiga” itu.

Kini, dalam era yang disebut dengan “globalisasi”, yang konon membuat dunia menjadi lebih cair batas-batasnya, dan semua orang secara teoretis punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya, ambivalensi peninggalan masa kolonial tersebut bukannya mereda. Fatalisme yang terkait dengan penerimaan dominasi bahasa asing tanpa pertanyaan di mana-mana kian dikukuhkan. Namun, pada saat yang sama, tanggapan kritis dan perlawanan terhadap kuasa hegemonik bahasa asing juga kian mengeras, sama persis dengan apa saja yang terjadi pada tataran ekonomi dan politik dunia saat ini. Penerimaan terhadap gagasan globalisasi kian hari kian menunjukkan sifat yang fatalistik. Globalisasi dipandang sebagai satu-

satunya opsi masa depan, dan tak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menolak atau menentangnya. Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di samping pengetahuan yang berasal dari Barat, dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menyambung hidup di era ini. Namun, barang kali sikap fatalistik itu tidak sepenuhnya tepat dan tidak sepenuhnya benar bahwa tak ada hal lain yang bisa dilakukan terhadap globalisasi selain menerimanya dengan kedua tangan terbuka lebar.

Globalisasi secara umum dan perlunya penguasaan bahasa asing pada khususnya memang tak dapat sepenuhnya ditolak. Yang perlu disikapi secara kritis adalah paradigma globalisasi seperti apa dan penguasaan bahasa asing untuk tujuan apa yang harus kita formulasikan agar gegar yang dialami oleh identitas kultural dan bahasa ibu kita tidak membuat kita mengadopsi cara pandang hegemonik yang di satu pihak bersifat universalistik terhadap dunia dan melihat perbedaan sebagai penyimpangan atau tanda ketidakberadaban. Bila para guru bahasa asing ingin memainkan peran yang strategis dalam era globalisasi tersebut, dalam artian mampu merekayasa arah pendidikan kaum muda dan pembelajar bahasa asing agar tidak tenggelam dalam jenis identitas yang bukan menjadi identitasnya. Dengan demikian, pengajaran bahasa asing tidak sekadar berurusan dengan bagaimana membuat para pembelajar mahir dalam bahasa asing, tetapi juga dengan bagaimana mereka dapat menjadi kritikus budaya yang berwawasan plural.

2.3 Catatan Kritis

Setelah mendalami secara sungguh penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini, penulis berpendapat bahwa diskursus yang lebih intensif mengenai kedaulatan bahasa Indonesia di era digital dalam terang pemikiran Frantz Fanon belum begitu banyak dibandingkan tema-tema yang lain. Pada hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang pernah mendalami fenomena kebahasaan masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Namun, diskursus tersebut hanya sampai pada kesimpulan menginternasionakan bahasa dan

memartabatkan bangsa Indonesia, peningkatan kemauan diri sendiri untuk mempelajari bahasa Indonesia, memperkuat kedaulatan bahasa Indonesia, menyediakan ruang publik efektif bagi masyarakat untuk memunculkan wacana tandingan, serta menegaskan kembali makna dan peran para pendidik bahasa asing di tengah gempuran era globalisasi. Pada hemat penulis, mayoritas penelitian sebelumnya hanya mempersoalkan dan memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya merupakan karikatur dari persoalan kebahasaan, sedangkan substansinya yang jauh lebih penting ternyata tidak berhasil diangkat ke permukaan.

Jika kita kaji lebih lanjut, penelitian tentang kedaulatan bahasa Indonesia di era digital belum begitu masif dilakukan. Padahal, problem tentang kedaulatan bahasa Indonesia sendiri merupakan suatu ancaman yang sudah berada di depan mata. Selain itu, konsep “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa*” ala Frantz Fanon sendiri pun mengalami nasib yang sama dengan problem kedaulatan bahasa Indonesia – sama-sama belum begitu masif detelisik dalam pelbagai konteks kehidupan di Indonesia. Padahal, corak berpikir pascakolonialisme yang masif didengungkan oleh Fanon sangatlah relevan dengan pelbagai persoalan yang dihadapi negara-negara bekas jajahan, termasuk Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk berani menggunakan konsep “*Manusia Kulit Hitam dan Bahasa*” Frantz Fanon dalam menyikapi persoalan kedaulatan bahasa Indonesia di era digital. Penulis meyakini bahwa tulisan yang tengah digarap ini akan menjadi suatu sumbangan tersendiri bagi minimnya kajian pascakolonialisme di Indonesia. Mengingat, kajian tentang pascakolonialisme di Indonesia sendiri belum begitu banyak. Lebih lanjut, penelitian tentang kedaulatan bahasa Indonesia di era digital akan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan serta eksistensi bahasa Indonesia di tengah gempuran digitalisasi dan bahaya negatif lainnya.